

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN PINRANG 2017

I P
M



<https://pinrang.kab.bps.go.id>



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN PINRANG 2017

I

P

M



Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2017

Katalog BPS	: 4102002.7315
Ukuran Buku	: 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: ii + 100

Naskah

Veronika Ratih Andriani, S. ST
Staf Seksi Statistik Sosial

Gambar Kulit

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Kabupaten Pinrang

Diterbitkan Oleh

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2017

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah secara keseluruhan. Terdapat tiga unsur dalam pengukuran IPM. Dimensi kesehatan direpresentasikan dalam indikator angka harapan hidup (AHH), dimensi pengetahuan oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita (PPP). Keseluruhan indikator diatas dirangkum dalam suatu nilai tunggal yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Publikasi IPM Kabupaten Pinrang 2017 berisi tentang pencapaian IPM di Kabupaten Pinrang tahun 2016. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan. Terimakasih kepada pihak yang membantu terbitnya publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan.

Pinrang, 17 Oktober 2017

BPS KABUPATEN PINRANG

Kepala,



H. Muh. Asri Lantong, SE

196611211993011001

Daftar Singkatan

ABH	: Angka Buta Huruf
AHH	: Angka Harapan Hidup
AMH	: Angka Melek Huruf
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
EYS	: Expected Years of schooling
EYS	: Expected Years of Schooling
GNP	: Gross National Product
HDI	: Human Development <i>Index</i>
HDR	: <i>Human Development Report</i>
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
MDG's	: <i>Millenium Development Goals</i>
MYS	: <i>Mean Years of Schooling</i>
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PPP	: <i>Purchasing Power Parity</i>
PUSTU	: Puskesmas Pembantu
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UNDP	: United Nations Development Programme
UUD	: Undang-Undang Dasar

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar	2
Daftar Singkatan	3
Daftar Isi	5
Daftar Gambar	7
Daftar Tabel	9
Bab 1 PENDAHULUAN.....	12
11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	17
12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru.....	20
Bab 2 VARIABEL TERKAIT IPM.....	26
21 Kependudukan.....	27
22 Pendidikan.....	30
2.2.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah..	43
23 Kesehatan.....	47
2.3.1 Harapan Hidup.....	50
2.3.2 Umur Pada Kehamilan Pertama.....	56
2.3.3 Keluarga Berencana.....	58
2.3.4 Pemberian ASI.....	62
24 Pengeluaran Perkapita.....	63

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2017

Bab 3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).....	68
3.1 Sumber Data.....	71
3.2 Manfaat IPM.....	71
3.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	72
3.3.1 Indeks Kesehatan.....	72
3.3.2 Indeks Pengetahuan.....	73
3.3.3 Standar Hidup Layak.....	76
3.3.4 Reduksi Shortfall.....	80
3.4 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang.....	82
Daftar Istilah Statistik.....	90
Daftar Pustaka.....	100

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1 Diagram Hitung IPM	24
Gambar 2 Persentase Penduduk Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2016.....	27
Gambar 3 Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 ..	30
Gambar 4 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pinrang 2014-2016.....	32
Gambar 5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016 ...	44
Gambar 6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Umur 25 Tahun Keatas Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016.....	46
Gambar 7 Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang 2016.....	48
Gambar 8 Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis di Kabupaten Pinrang 2014-2016.....	50
Gambar 9 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2016.....	51
Gambar 10 Banyaknya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kabupaten Pinrang Tahun 2016 ..	55
Gambar 11 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Umur Perkawinan Pertama di Pinrang Tahun 2016.....	57

Gambar 12 Persentase Perempuan 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB, 2016	60
Gambar 13 Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang ber-KB Menurut Jenis Alat KB, Tahun 2016	61
Gambar 14 Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan Menurut Lama Pemberian ASI dan Jenis Kelamin, 2016	62
Gambar 15 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2016	64
Gambar 16 Pengeluaran Perkapita Pertahun Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2016 (dalam ribuan rupiah)	66
Gambar 17 IPM Kabupaten Pinrang 2011-2016	83
Gambar 18 Reduksi Shortfall per tahun, 2010-2016.....	88

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016.....	28
Tabel 2 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017	35
Tabel 3 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MI Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017	36
Tabel 4 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017	37
Tabel 5 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MTs Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017	38
Tabel 6 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMA/SMK Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017	40
Tabel 7 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MA Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017	40
Tabel 8 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	52

Tabel 9 Banyaknya Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2016	54
Tabel 10 Dimensi, Indikator dan Indeks Dimensi Pembangunan Manusia	70
Tabel 11 Komoditi Kebutuhan Pokok Dasar Penghitungan Daya Beli	77
Tabel 12 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM.....	78
Tabel 13 Kriteria Tingkatan Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81
Tabel 14 Indeks Pembentuk IPM Kabupaten Pinrang, 2015-2016	82
Tabel 15 IPM Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Tahun 2016.....	85

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab 1

Pendahuluan

1

BAB I PENDAHULUAN

Sejatinya pembangunan di Indonesia sudah dilakukan dari jaman sebelum kemerdekaan walaupun pada saat itu pembangunan masih dikontrol oleh penjajah. Namun, pembangunan yang terstruktur dan berkesinambungan baru dimulai periode tahun 1970-an. Pembangunan diberbagai bidang terus dilakukan diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Berbagai pemberitaan tentang pembangunan di Indonesia terus di kabarkan ke pelosok negeri. Akan tetapi, apakah pembangunan yang selama ini telah mencerminkan pembangunan yang sebenarnya??

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berorientasi pada manusia, artinya manusialah yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan tersebut. Sejarah mencatat sampai tahun 1999 masih diterapkannya sistem sentralistik. Segala perencanaan sampai evaluasi pembangunan di Indonesia pun juga dilakukan secara terpusat. Namun, sejak diberlakukannya Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi dimulai.

Sistem desentralisasi lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Sistem ini menuntut pemerintah daerah lebih pro-aktif dalam upaya pembangunan sesuai dengan realitas yang ada yaitu

sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing dan tentunya mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Dewasa ini dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat maka perencanaan pembangunan hendaknya tidak hanya mengedepankan pembangunan di bidang ekonomi ataupun pemenuhan sarana dan prasarana saja, melainkan juga harus melibatkan aspek manusia di dalamnya. Untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dibutuhkan masyarakat Indonesia yang unggul dari segi SDA dan SDM-nya.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia yang hakiki pada dasarnya ialah mampu menciptakan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud ialah rakyat mampu memilih apa yang mereka inginkan dan mampu menjalani kehidupan secara mandiri.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep di atas, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan

pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model “pertumbuhan ekonomi” lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. “Pembangunan sumber daya manusia” cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan “kesejahteraan” melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan “kebutuhan dasar” terfokus pada penyediaan barang dan jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu *gender*. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Pembangunan manusia merupakan perwujudan

jangka panjang yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Isu yang hangat mengenai ekonomi Indonesia secara khusus maupun ASEAN secara umum adalah mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*MEA*) 2017. Oleh karenanya kualitas manusia sangatlah penting disini sebagai modal dasar pembangunan dan menghadapi persaingan di era globalisasi. Pola pikir inilah yang harus dipegang untuk menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Cara pandang inilah yang memungkinkan pemerintah dapat memenuhi hak-hak warga negara secara tepat.

Sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari kuantitas tetapi juga harus diperhatikan aspek kualitas. Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam usaha meningkatkan kualitas manusia Indonesia, melingkupi aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan (daya beli) maupun aspek moralitas. Tak dipungkiri berbagai upaya tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan utama yaitu menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas.

1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menarik sejarah kebelakang yaitu sebelum tahun 1970-an, dalam upaya evaluasi pemerintah hanya melihat keberhasilan pembangunan berdasarkan pertumbuhan GNP baik secara total maupun perkapita. Memang benar terjadi peningkatan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan dari keberhasilan pembangunan berbanding lurus dengan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, dikarenakan kesadaran bahwa pembangunan bukan perkara mudah karena mencakup segi-segi kehidupan yang kompleks, maka diperlukan indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia. Alat ukur inilah yang dikenal dengan IPM.

Konsep inilah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara maupun wilayah tertentu yang pembangunannya tidak hanya ditandai oleh tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi melainkan juga mencakup pula kualitas manusianya. Kondisi inilah yang menjadi tantangan semua pihak untuk menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia.

Secara sederhana IPM adalah indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk/masyarakat dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Di dalam pembangunan manusia fokus utama pastilah manusia itu sendiri, oleh karenanya IPM bermanfaat

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2017

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Bahkan secara internasional, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Terlebih khusus bagi negara Indonesia, IPM dijadikan data yang sangat amat strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator bagi Dana Alokasi Umum (DAU) tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Secara konseptual IPM adalah alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari suatu wilayah yang terdiri dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*a decent standard of living*). Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Paradigma Pembangunan Manusia Terdiri dari 4 Komponen Utama:

1. *Produktivitas “Masyarakat harus dapat meningkatkan mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia”*
2. *Pemerataan “Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini”*
3. *Kesinambungan “Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk pemodalatan fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi”*
4. *Pemberdayaan “Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka”*

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 1995

1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi IPM dan hasilnya pada tahun yang sama UNDP mencatat beberapa negara yang mengalami kemajuan tecepat dalam peningkatan IPM. Indonesia pada kurun waktu 1970-2010 termasuk dalam *World's Top Movers in HDI Improvement*. IPM Indonesia tahun 2013 sebesar 68,5 (kategori menengah) dan menduduki peringkat 108 dari 187 negara. Sedangkan tahun 2014 IPM Indonesia sebesar 68,4 persen dan menempati peringkat 110 dari 187 negara. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi peringkat Indonesia justru mengalami penurunan dikarenakan kenaikan IPM di negara-negara lain jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.

Kenapa Harus Menggunakan IPM Metode Baru?

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM, ialah:

- ✓ Beberapa indikator sudah tidak tepat lagi digunakan dalam penghitungan IPM, Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena

tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan seutuhnya. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

- ✓ Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk penduduk 15 tahun keatas dirasa sudah tidak relevan lagi karena hanya mengukur kemampuan rata-rata lama sekolah dalam lingkup tamat SMA saja.
- ✓ Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- ✓ Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian yang tinggi pada dimensi lain.

Apa Saja Keunggulan IPM Metode Baru?

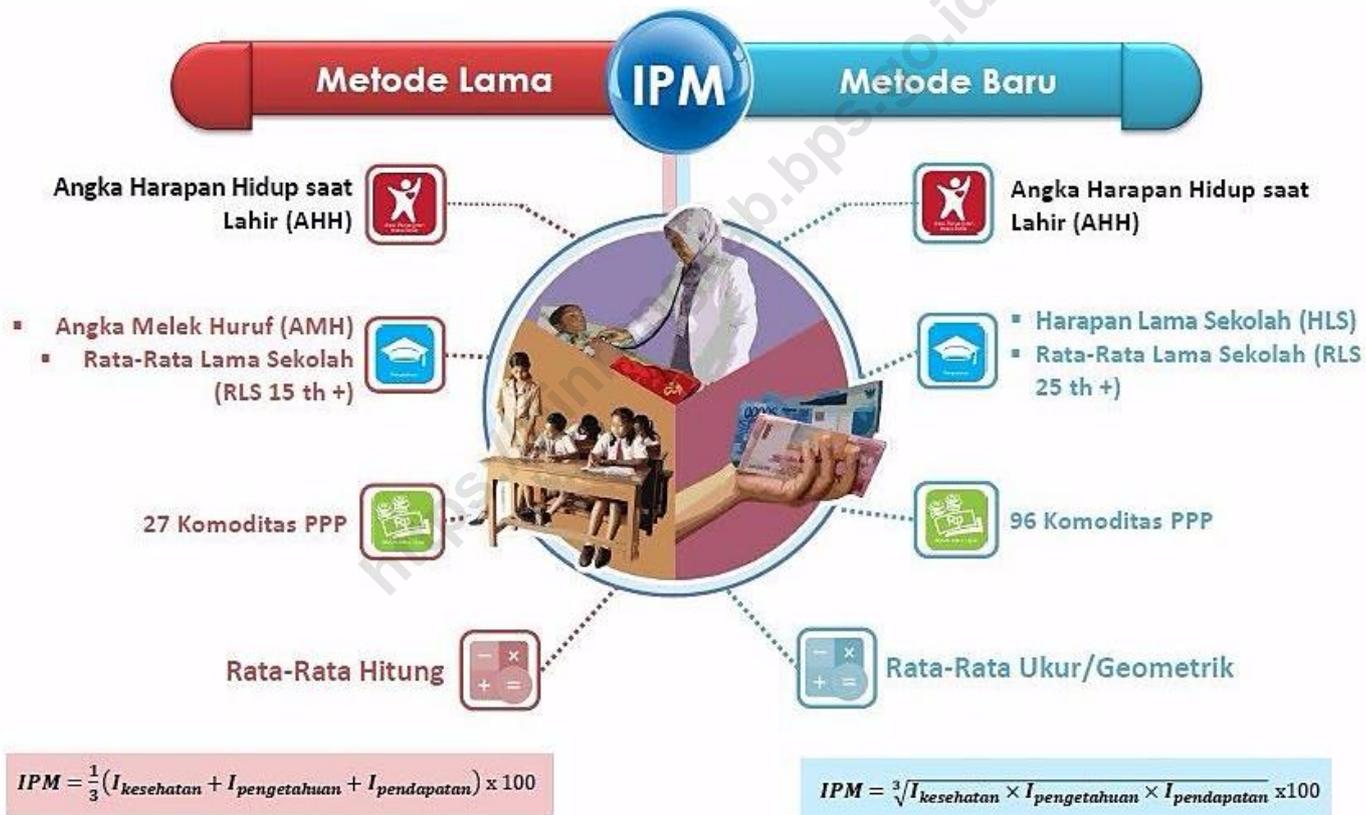
IPM metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif), yaitu dengan cara :

- ✓ Angka Melek Huruf (AMH) digantikan dengan indikator yang lebih sesuai dan tidak diskriminatif yaitu Harapan

Lama Sekolah (HLS) sehingga didapatkan gambaran yang relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi;

- ✓ Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggunakan 25 tahun keatas, karena diharapkan mampu mencerminkan kemampuan rata-rata penduduk menyelesaikan pendidikan formalnya. Diasumsikan bahwa kondisi normal rata-rata sekolah suatu wilayah tidak akan turun.
- ✓ PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- ✓ Capaian yang rendah pada suatu komponen tidak bisa ditutupi oleh komponen lain yang capaiannya lebih tinggi karena menggunakan rata-rata geometrik, artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama karena sama pentingnya.

“Peningkatan pembangunan manusia hendaknya tidak hanya memfokuskan pada komponen penyusun IPM saja, namun jauh dari itu perlu dikaji dan dipertimbangkan indikator-indikator lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi peningkatan komponen-komponen dalam IPM. Fokus dalam perbaikan kesehatan dan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi taraf kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu tindakan secara menyeluruh untuk membentuk manusia yang berkualitas.”



Gambar 1 Diagram Hitung IPM

<https://pinrangkab.bps.go.id>

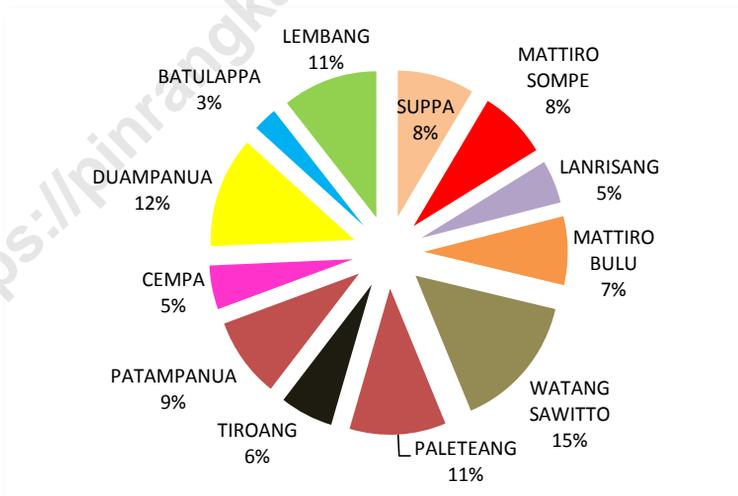
Bab 2

Variabel Terkait IPM

2

2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang terus menerus meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Kabupaten Pinrang tercatat sebanyak 364.087 jiwa pada tahun 2014, selanjutnya mencapai 366.789 jiwa pada tahun 2015, dan meningkat menjadi 369.595 jiwa pada tahun 2016. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2015 ke 2016 tercatat sebesar 1,08 persen, dengan kepadatan penduduk rata-rata adalah 188,4 jiwa per km².



Gambar 2 Persentase Penduduk Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2016

Jika dilihat dari jumlah penduduknya, pada tahun 2016 Kecamatan Watang Sawitto memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 55.571 jiwa. Selanjutnya, Kecamatan Duampanua dengan jumlah penduduk 45.438 jiwa.

Tabel 1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016

Kelompok Umur	2015			2016		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 14	31,65	28,65	30,11	31,31	28,37	29,79
15 - 64	62,67	63,92	63,31	62,91	64,09	63,52
65 +	5,68	7,42	6,58	5,78	7,54	6,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Pinrang diolah

Seperti terlihat pada Tabel 1, komposisi penduduk di Kabupaten Pinrang didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Pada tahun 2016, komposisi penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 63,52 persen, penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebesar 29,79 persen sementara penduduk kelompok umur tua (65+ tahun) sebesar 6,69 persen. Terlihat bahwa penduduk kelompok umur 15-64 dan 65+ mengalami peningkatan

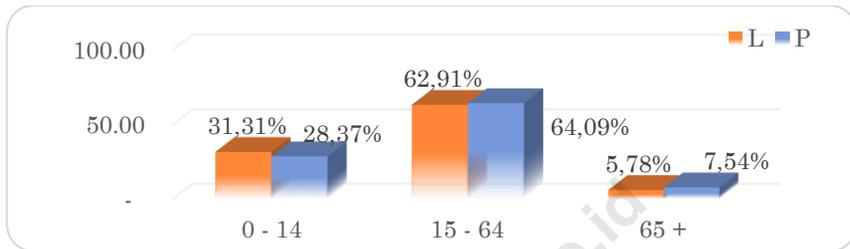
dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun justru mengalami penurunan.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Pinrang sebesar 57,44 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 penduduk umur produktif menanggung/membiayai hidup sekitar 57-58 penduduk umur tidak produktif. Penurunan angka beban ketergantungan dibandingkan tahun 2015 (57,95 persen) menyiratkan bahwa beban penduduk kelompok umur produktif pada tahun 2016 menurun untuk membiayai penduduk tidak produktif.

Penduduk adalah aset yang berharga bila diarahkan dengan benar, artinya perlu perencanaan yang tepat sesuai jenis kelamin. Jika dilihat secara umum, maka persentase penduduk perempuan di Kabupaten Pinrang lebih banyak dibandingkan persentase penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* penduduk Pinrang pada tahun 2016 adalah 94,24. Artinya, di setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa persentase penduduk laki-laki berumur 0-14 tahun lebih tinggi (31,31 persen) daripada penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama (28,37persen). Sementara itu, pada kelompok umur 15-64 tahun dan

65 tahun keatas persentase penduduk perempuan justru lebih tinggi daripada penduduk laki-laki.



Gambar 3 Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Persentase penduduk umur 15-64 tahun (63,52 persen) selama tahun 2016 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 (63,31 persen). Begitu juga pada kelompok umur 65 tahun ke atas, tahun 2016 (6,69 persen) lebih tinggi dari tahun 2015 (6,58 persen). Hal ini berarti bahwa semakin lama jumlah penduduk berumur produktif (15-64 tahun) semakin meningkat, begitu pula dengan jumlah penduduk berumur tua (65 tahun keatas).

2.2 Pendidikan

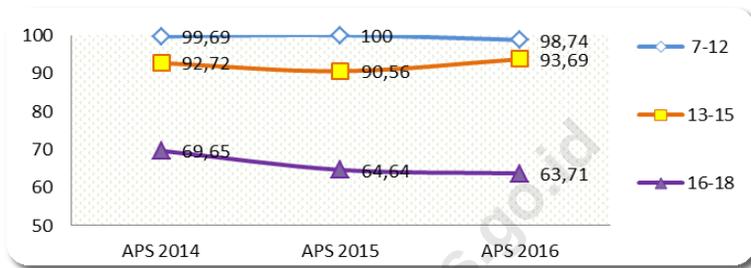
Pembangunan yang diperlukan dewasa ini terletak pada aspek pendidikan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pendidikan. Akan tetapi, masih terdapat berbagai kendala, diantaranya adalah faktor kemiskinan, geografis dan budaya.

Terkadang, bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak di pendidikan formal, hal ini terasa begitu memberatkan. Walaupun sudah ada program pemerintah yang memudahkan tercapainya pendidikan untuk semua namun biaya pendidikan di luar sekolah formal masih sangat besar. Pola pikir inilah yang menyebabkan orang tua cenderung mengarahkan anaknya untuk bekerja dalam membantu perekonomian keluarga.

Selain itu, sebagian masyarakat menganggap bahwa pendidikan tidak akan menjamin perbaikan taraf hidup. Padahal, proses pendidikan tidak akan merubah taraf hidup secara instan karena proses di dalamnya yang akan membentuk kepribadian seseorang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Secara ideal, dalam proses pembangunan cakupan pendidikan formal mengalami perluasan. Artinya, terjadi peningkatan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan. Program-program pemerintah seperti pemberantasan buta aksara, pemberian dana operasional sekolah atau BOS, serta menjamin keberlangsungan program wajib belajar 9 tahun terus diselenggarakan.

Pemerataan akses terhadap pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Gambar 4 menunjukkan capaian APS dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tahun 2016, APS pada kelompok umur 7-12 tahun (SD) tercatat 98,74 yang artinya dari setiap 100 anak berusia 7-12 tahun, terdapat 98 sampai 99 anak

yang telah mengenyam pendidikan dasar SD dan dapat diartikan juga telah terjadi pemerataan kesempatan pendidikan untuk sekolah dasar. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2015 yaitu 100.



Gambar 4 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pinrang 2014-2016

Hal yang serupa terjadi pula pada APS SMA, tahun 2016 63,71 lebih rendah daripada tahun 2015 yaitu 64,64. Sementara untuk APS SMP, justru terjadi peningkatan APS dari tahun 2015 (90,56) menjadi 93,69 pada tahun 2016.

Jika dilihat lebih seksama, penurunan yang paling signifikan terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun pada tahun 2014 ke 2015 yaitu 5,01 (-5.01). Tren negatif ini menunjukkan telah terjadi penurunan performa dari setiap *stakeholder* baik pemerintah maupun masyarakat umum dalam upaya pemenuhan pendidikan di taraf SMA. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang khususnya pemerintah dapat lebih mempermudah masyarakat umum untuk mengenyam pendidikan SMA.

Perlu disadari bahwa jenjang SMA adalah pintu gerbang untuk dapat melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi atau dewasa ini dijadikan syarat minimal untuk bekerja pada level terendah, oleh karenanya perlu ditingkatkan lagi skema peningkatan angka partisipasi sekolah contohnya dengan diperbanyak beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dan perlu dilakukan konseling pendidikan lebih intensif.

Permasalahan klasik dalam dunia pendidikan dan tentunya menghambat tercapainya kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan adalah mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan tidak dapat memberikan keuntungan langsung secara ekonomi sedangkan semakin mahalnya biaya pendidikan bagi sebagian masyarakat berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau menamatkan pendidikan yang sedang dijalani (putus sekolah).

Mengingat pentingnya pendidikan maka perhitungan IPM menggunakan salah satu komponen pembentuk dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam penghitungan IPM metode baru indikator yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Berawal tahun 1984 pemerintah mencanangkan gerakan wajib belajar untuk anak umur 7-12 tahun. Selain bertujuan untuk mereduksi persentase penduduk yang tidak tamat SD, secara

implisit kebijakan ini juga menegaskan bahwa pendidikan SD merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Sejalan dengan tuntutan global, pemerintah juga menuangkan kebijaksanaan pengembangan SDM dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1994, pemerintah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dengan kata lain, pendidikan SMP sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar setiap penduduk.

Jika harus membandingkan dengan capaian SDG's (Sustanaible Development Goal's) atau kelanjutan MDG's (Millenium Development Goal's) yang salah satu tujuannya adalah pendidikan dasar untuk semua maka kondisi tahun 2016 di Kabupaten Pinrang hanya pada tahap level SD saja yang telah memenuhi kriteria SDG's dan diharapkan tidak hanya pada level SD di Kabupaten Pinrang bisa mencapai APS 100 tetapi juga pada jenjang berikutnya SMP dan SMA, tentunya dengan kerja keras dari seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang untuk tahun ajaran 2016/2017, pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pinrang tercatat sebanyak 323 sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 3.422 orang dan jumlah murid sebanyak 41.969 orang. Kondisi di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017 pada jenjang pendidikan SD,

seorang guru (baik guru tetap/PNS maupun Honorer) rata-rata mengajar 12–13 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 129-130 orang murid. Daya tampung sekolah tahun 2016/2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015/2016 dikarenakan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah sekolah.

Tabel 2 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid - Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	27	3.283	262	12,53
Mattiro Sompe	24	2.919	235	12,42
Lanrisang	19	1.793	168	10,67
Mattiro Bulu	26	3.004	303	9,91
Watang Sawitto	32	6.248	417	14,98
Paleteang	24	4.043	318	12,71
Tiroang	19	2.514	226	11,12
Patampanua	32	3.781	339	11,15
Cempa	19	2.049	172	11,91
Duampanua	40	5.378	413	13,02
Batulappa	14	1.257	125	10,06
Lembang	47	5.700	444	12,84
Pinrang	323	41.969	3.422	12,26

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Tabel 3 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MI Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid – Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	2	437	32	13,66
Mattiro Sompe	4	337	41	8,22
Lanrisang	3	218	48	4,54
Mattiro Bulu	3	242	27	8,96
Watang Sawitto	4	327	49	6,67
Paleteang	1	67	13	5,15
Tiroang	-	-	-	-
Patampanua	4	411	43	9,56
Cempa	-	-	-	-
Duampanua	3	241	27	8,93
Batulappa	2	202	23	8,78
Lembang	2	157	19	8,26
Pinrang	28	2639	322	8,20

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

Untuk pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pinrang tercatat berjumlah 28 madrasah, 322 guru dan 2.639 murid. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata guru di MI mengajar 8-9 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 94-95 orang murid.

Tabel 4 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid - Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	4	1.296	96	13,50
Mattiro Sompe	3	1.329	69	19,26
Lanrisang	2	503	34	14,79
Mattiro Bulu	4	1.445	96	15,05
Watang Sawitto	6	3.390	195	17,38
Paletang	3	1.536	99	15,52
Tiroang	4	972	83	11,71
Patampanua	5	1.586	139	11,41
Cempa	3	1.025	74	13,85
Duampanua	7	2.293	152	15,09
Batulappa	4	428	57	7,51
Lembang	11	2.233	163	13,70
Pinrang	56	18.036	1.257	14,35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Sementara pada jenjang pendidikan SMP tercatat jumlah sekolah sebanyak 56 unit, guru sebanyak 1.257 orang dan murid sebanyak 18.036 orang. Pada jenjang ini, seorang guru baik tetap PNS maupun honorer rata-rata mengajar 14-15 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 322-323 orang murid.

Berikutnya pada jenjang pendidikan madrasah MTs tercatat jumlah madrasah sebanyak 22 unit, guru sebanyak 317 orang dan

murid sebanyak 2.926 orang. Pada jenjang ini, seorang guru baik tetap PNS maupun honorer rata-rata mengajar 9-10 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 133 orang murid.

Tabel 5 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MTs Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid - Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	1	341	24	14,21
Mattirosompe	1	218	17	12,82
Lanrisang	3	342	34	10,06
Mattirobulu	1	131	12	10,92
Watang Sawitto	2	80	18	4,44
Paletang	4	822	100	8,22
Tiroang	0	0	0	-
Patampanua	2	165	17	9,71
Cempa	1	58	10	5,80
Duampanua	4	400	48	8,33
Batulappa	2	179	24	7,46
Lembang	1	190	13	14,62
Jumlah	22	2.926	317	9,23

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

Apabila dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun, maka anak umur 7-15 tahun harus mengikuti program pendidikan,

maka pada tahun 2016, di Kabupaten Pinrang 96,215 persen anak pernah mengikuti pendidikan dasar dan 6,31 persen anak tidak sempat melanjutkan ke jenjang SMP (putus sekolah). Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi sekolah melalui program wajib belajar 9 tahun begitu gencarnya. Hal ini menunjukkan kemampuan daya serap sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Pinrang relatif perlu ditingkatkan. Tetapi perlu diingat bahwa harapan dan target yang sebenarnya ingin dicapai adalah agar tidak ada lagi anak umur 7-15 tahun yang tidak bersekolah.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Pendidikan merupakan pembentuk watak bangsa di segala bidang kehidupan, khususnya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik di berbagai bidang ilmu pengetahuan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, hendaknya perlu juga didukung dengan akses yang mudah menuju fasilitas pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.

Berdasarkan tabel 6, tercatat jumlah sekolah SMA/SMK sebanyak 31 sekolah, guru sebanyak 1.014 orang dan murid sebanyak 16.340 orang. Pada jenjang ini, seorang guru rata-rata

mengajar 16-17 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah rata-rata mencapai 527-528 murid.

Tabel 6 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMA/SMK Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid - Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	2	857	72	11,90
Mattiro Sompe	1	756	47	-
Lanrisang	1	348	20	-
Mattiro Bulu	2	1.478	96	15,40
Watang Sawitto	8	6.118	322	19,00
Paleteang	5	964	73	13,21
Tiroang	2	661	57	11,60
Patampanua	2	1.340	87	15,40
Cempa	1	434	34	-
Duampanua	4	1.740	107	16,26
Batulappa	1	153	24	6,38
Lembang	2	1.491	75	19,88
Jumlah	31	16.340	1.014	16,11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Tabel 7 menunjukkan data pada jenjang pendidikan MA. Dengan jumlah madrasah MA sebanyak 7 madrasah, guru sebanyak 109 orang dan murid sebanyak 1.261 orang. Pada jenjang ini, seorang guru rata-rata mengajar 11-12 orang murid, dengan

kemampuan daya tampung sekolah rata-rata mencapai 180-181 orang murid.

Tabel 7 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MA Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2016/2017

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid - Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	0	0	0	-
Mattiro Sompe	1	53	8	6,63
Lanrisang	2	96	17	5,65
Mattiro Bulu	1	66	10	6,60
Watang Sawitto	0	0	0	-
Paleteang	2	930	58	16,03
Tiroang	0	0	0	-
Patampanua	0	0	0	-
Cempa	0	0	0	-
Duampanua	1	116	16	7,25
Batulappa	0	0	0	-
Lembang	0	0	0	-
Jumlah	7	1.261	109	11,57

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

Jika diamati secara seksama, terlihat bahwa minat masyarakat akan sekolah MI, MTs, maupun MA tergolong lebih rendah dibandingkan sekolah konvensional, yaitu SD, SMP dan SMA baik negeri maupun swasta. Sehingga hal ini mempengaruhi pula jumlah murid serta guru di tiap jenjang pendidikan.

Pendidikan agama di sekolah sebenarnya memiliki andil besar menjadi penentu pembentukan watak dan karakter manusia terutama dari segi akhlak. Akan tetapi, mayoritas orang tua menganggap bahwa sekolah berbasis agama akan memberatkan anak dari segi kuantitas yang dipelajari dengan waktu belajar yang sama dengan sekolah konvensional. Selain itu stigma bahwa pendidikan berbasis agama adalah pendidikan kelas dua juga sering dielukan masyarakat umum yang menganggap terbelakang, sulit dan tidak bermutu.

Sekolah berbasis agama seperti MI, MTs, dan MA selayaknya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar masyarakat lebih cenderung bersekolah disana. Hal ini dikarenakan dewasa ini telah muncul sekolah sekolah berbasis agama yang bermutu dan justru menjadi sekolah unggulan. Bahkan turut mengantarkan para muridnya mencapai prestasi yang memuaskan baik ditingkat nasional maupun internasional. Oleh karenanya perlu kerja keras untuk bisa menggaungkan madrasah sebagai lembaga pendidikan bermutu sekaligus wadah untuk membentuk watak islami pada anak-anak.

2.2.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Penghitungan IPM metode baru tidak lagi menggunakan Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu indikator pendidikan. Akan tetapi, menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS). Melek huruf tidak lagi digunakan karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik (angka melek huruf sebagian daerah sudah tinggi). Sebagai gantinya digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) karena diharapkan bisa menggambarkan aspek pengetahuan (knowledge) dalam pembangunan manusia secara nyata.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS diperoleh dengan asumsi bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama pada saat ini. Harapan Lama Sekolah yang digunakan adalah untuk penduduk umur tujuh tahun ke atas. Kegunaan HLS untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



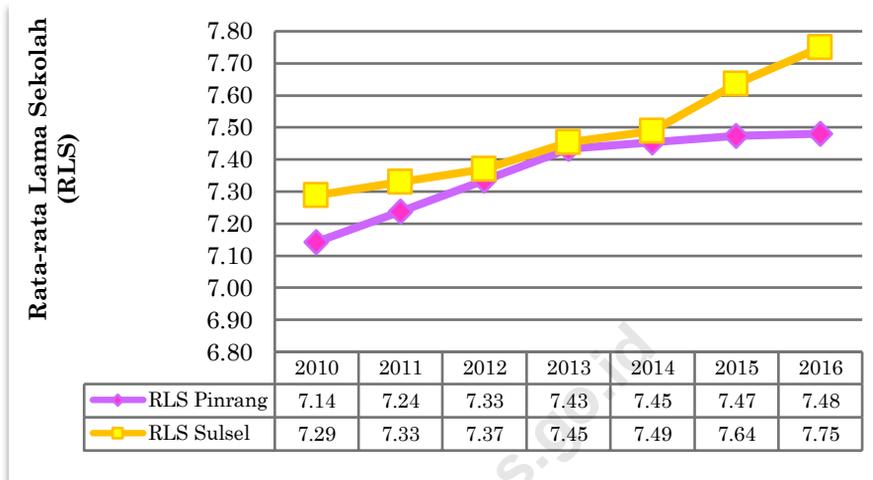
Gambar 5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016

Berdasarkan Gambar 5 Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas Kabupaten Pinrang memperlihatkan tren yang meningkat selama 7 tahun terakhir. HLS tahun 2016 adalah 13,18 tahun. Sejak 3 tahun belakangan dari tahun 2014 HLS Kabupaten Pinrang nyaris stabil di angka 13 tahun. Angka ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan HLS Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 13,16 tahun pada 2016. Bahkan dibandingkan dengan seluruh kabupaten se-provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang memiliki angka harapan lama sekolah ranking ke 9 tertinggi.

Selain HLS, indikator lain untuk menggambarkan dimensi pengetahuan pada pembangunan manusia adalah Rata-rata Lama

Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk rata-rata lama sekolah, populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 25 tahun keatas karena diasumsikan bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Gambar 6. menyajikan angka RLS penduduk Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu tahun 2010-2016. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2010 sebesar 7,14 tahun, dan meningkat 0,34 tahun pada 2016 menjadi 7,48 yang artinya bahwa rata-rata penduduk yang bersekolah di Pinrang hanya mampu menyelesaikan sekolah sampai dengan kelas 1-2 SMP. Untuk RLS terlihat secara umum Kabupaten Pinrang masih dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu 2010-2016, hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan terhadap akses pendidikan yang lebih merata tidak hanya berfokus dipusat kota saja tetapi juga untuk daerah sulit, dipinggiran kota ataupun kecamatan terpencil.



Gambar 6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Umur 25 Tahun Keatas Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016

Dari angka-angka yang ditampilkan diatas nampak disisi terdapat prestasi tersendiri yaitu meningkatnya HLS dan berada diatas rata-rata provinsi. Namun disisi lain RLS masih lebih rendah jika dibandingkan angka provinsi. Kondisi ini mencerminkan bahwa sekalipun angka HLS menunjukkan tren yang baik namun RLS masih dibawah rata-rata. Sehingga perlu upaya yang lebih maksimal lagi untuk menyelaraskan antara HLS yang tinggi dengan kenyataan sesungguhnya bahwa RLS masih lebih rendah dari rata-rata provinsi.

2.3 Kesehatan

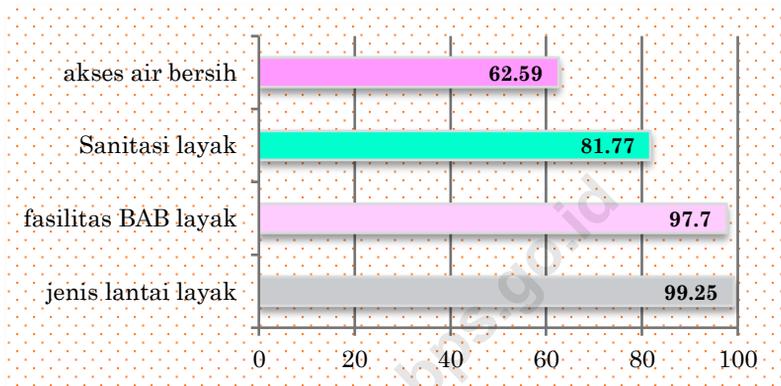
Salah satu upaya dalam peningkatan mutu SDM adalah melalui peningkatan kualitas hidup manusia dari segi kesehatan. Perlu disadari, selain pendidikan, aspek kesehatan tak kalah pentingnya sebagai salah satu pilar dalam pembangunan manusia. Sehingga sudah sepantasnyalah pemerintah dapat lebih meningkatkan fasilitas kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Seiring terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang dapat mengukur adalah angka morbiditas. Penduduk yang mengalami morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data Susenas, angka morbiditas Kabupaten Pinrang sebesar 24,43 persen pada tahun 2016, angka ini menunjukkan terjadi peningkatan kualitas kesehatan yang cukup signifikan pada penduduk Kabupaten Pinrang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 33,99 persen.

Sementara itu tingkat morbiditas dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu diantaranya faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan dan kependudukan/keturunan. Dalam konsep derajat kesehatan, faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang adalah faktor lingkungan. Konsep ini

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2017

menyatakan bahwa lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan.



Gambar 7 Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang 2016

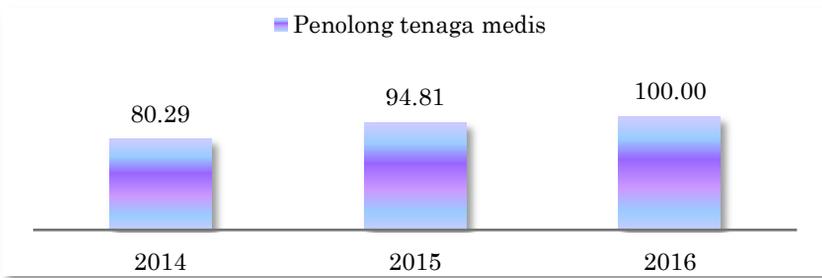
Melalui program *MDG's*, pemerintah Indonesia telah menetapkan indikator sanitasi layak sebagai salah satu target dalam tujuan ketujuh yaitu menjamin kelestarian lingkungan hidup. Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu dilengkapi dengan kloset leher angsa dan terdapatnya pembuangan akhir tinja berupa tanki/spal. Gambar 7. menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Pinrang adalah sebesar 81,77 persen.

Indikator lingkungan hidup lainnya yang tercantum dalam *MDG's* salah satunya adalah akses terhadap air bersih. Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 sebanyak 62,59 persen rumah

tangga yang memiliki akses terhadap air minum bersih. Selanjutnya masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas pembuangan air besar yang layak sebesar 2,3 persen. Indikator selanjutnya adalah masih tercatat 0,75 persen saja rumah tangga di Pinrang yang menggunakan tanah sebagai lantai rumah. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga, karena kondisi rumah yang tidak sehat akan menghambat masyarakat mencapai derajat kesehatan yang baik.

Indikator-indikator diatas akan mempengaruhi kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. Oleh karenanya perlu diperhatikan indikator lain selain komponen IPM yang ada, karena derajat kesehatan dipengaruhi oleh banyak indikator dasar dan diharapkan pembangunan dimulai dari indikator dasar tersebut. Jika dikaitkan dengan tingkat mordibitas yang mengalami penurunan maka tetap perlu upaya peningkatan dari segi kualitas kebersihannya.

Faktor penting lainnya dalam mewujudkan pembangunan adalah tersedianya pelayanan kesehatan untuk persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter kandungan, dokter umum, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Dalam praktek persalinan maka faktor penentu keselamatan ibu dan anak adalah proses kelahiran yang aman sesuai kaidah medis yang benar karenanya diharapkan akan menurunkan risiko kematian ibu dan anak.



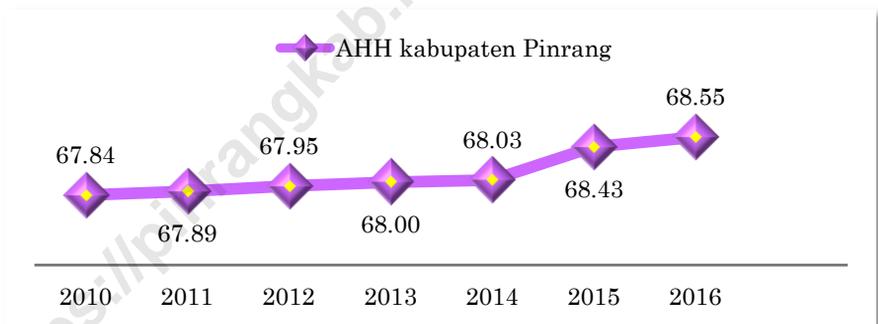
Gambar 8 Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis di Kabupaten Pinrang 2014-2016

Pada tahun 2016, tercatat bahwa seluruh persalinan di Kabupaten Pinrang ditolong oleh tenaga medis (100 persen). Angka ini mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada gambar 8. Kondisi ini tentu saja menggembirakan karena menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli tentang proses persalinan yang aman dan rendah risiko. Adanya bidan di daerah hingga level desa serta akses jalan ke kota yang semakin mudah terbukti ampuh untuk meningkatkan angka persalinan dibantu tenaga medis.

2.3.1 Harapan Hidup

Salah satu komponen dalam penghitungan IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Kemampuan untuk hidup lebih

lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir. Pencapaian angka harapan hidup penduduk Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun memperlihatkan garis yang selalu meningkat signifikan (lihat gambar 9). Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2015, yaitu naik hampir 0.5. Sementara itu, AHH tahun 2016 Kabupaten Pinrang adalah sebesar 68,55. Angka tersebut berarti bahwa penduduk Kabupaten Pinrang ketika lahir diharapkan akan mampu bertahan hidup hingga 68-69 tahun ke depan.



Gambar 9 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2016

Kondisi AHH tidak berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan dengan variabel kesehatan lainnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi lingkungan dan pelayanan kesehatan memiliki keterkaitan terhadap kualitas angka harapan hidup. Selanjutnya

dijelaskan beberapa variabel yang memiliki keterkaitan terhadap AHH, antara lain angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu dan yang tak kalah pentingnya adalah status gizi baik anak-anak maupun kelompok ibu-ibu umur 15-49 tahun. Mengingat besarnya resiko seorang ibu dalam melahirkan seorang anak, maka sangat diperlukan adanya kemudahan untuk akses ke pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran dengan resiko tinggi.

Tabel 8 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2016

Uraian	Status		Jumlah
	Pemerintah	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit	1	2	3
Puskesmas	16	0	16
Balai Pengobatan	0	6	6
Rumah Bersalin	0	1	1
Polindes	2	0	2
Posyandu	369	0	369
Jumlah	388	9	397

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

Dari Tabel 9 diatas terlihat bahwa pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Pinrang cukup baik. Hal ini dapat dilihat

dari adanya rumah sakit maupun rumah bersalin di daerah. Sehingga, masyarakat memiliki alternatif berobat yang lebih baik fasilitasnya. Keberadaan Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Pinrang yang berada di seluruh kecamatan bahkan kelurahan maupun desa, dirasa sangat membantu masyarakat untuk bisa berobat yang relatif dekat, murah dan berkualitas.

Puskesmas atau Pustu adalah fasilitas kesehatan terdepan di masyarakat artinya masyarakat akan lebih mudah mendapatkan fasilitas kesehatan di lingkungan tinggalnya tanpa harus jauh meninggalkan desa/kecamatannya. Rasio penduduk terhadap puskesmas yang dibantu oleh Polindes dan Posyandu di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 sebesar 1:955, artinya satu puskesmas yang dibantu Polindes dan Posyandu harus melayani sekitar 955 penduduk. Rasio ini menunjukkan bahwa beban Puskesmas maupun pustu sangat besar karena harus melayani kesehatan penduduk yang hampir seribu penduduk. Oleh karena itu, keberadaan Puskesmas, Polindes dan Posyandu perlu diperbanyak lagi agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih optimal.

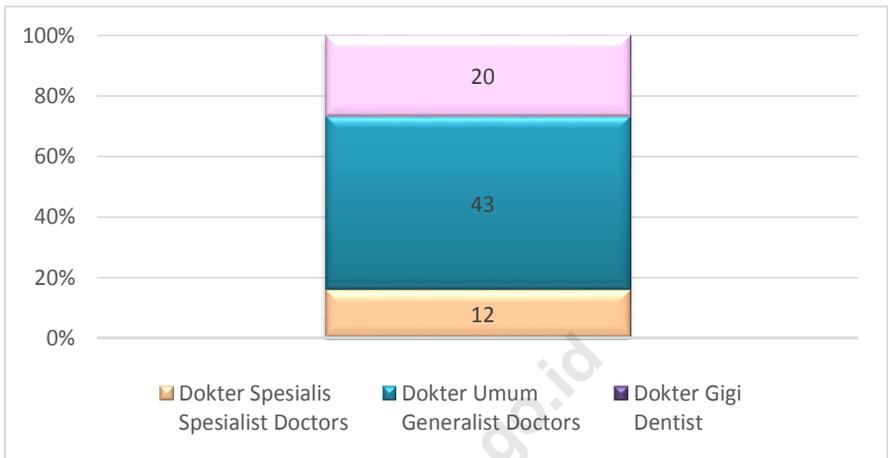
Jika dilihat dari jumlah tenaga medisnya, pada tahun 2016, di Kabupaten Pinrang terdapat 75 tenaga medis, 153 bidan, 266 perawat, 26 tenaga farmasi masyarakat, dan 160 tenaga kesehatan lainnya. Total seluruh tenaga kesehatan mencapai 668 orang.

Rasio bidan terhadap penduduk sebesar 1:2.415, artinya satu bidan harus melayani sekitar 2.415 penduduk. Rasio penduduk terhadap perawat pada tahun 2016 sebesar 1:1.389, artinya satu perawat harus mampu merawat 1.389 penduduk.

Tabel 9 Banyaknya Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2016

Kecamatan	Tenaga Kesehatan					Jumlah
	Tenaga Medis	Perawat	Bidan	Farmasi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Suppa	5	15	14	0	13	47
Mattiro Sompe	4	15	9	2	4	34
Lanrisang	2	14	7	1	11	35
Mattiro Bulu	4	20	13	0	10	47
Watang Sawitto	34	128	27	21	58	256
Paletiang	4	6	6	0	8	24
Tiroang	4	8	8	1	7	28
Patampanua	3	11	13	0	8	35
Cempa	5	15	13	1	9	43
Duampanua	5	19	16	0	21	61
Batulappa	2	9	16	0	3	30
Lembang	3	6	11	0	8	28
PINRANG	75	266	153	26	160	668

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang



Gambar 10 Banyaknya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kabupaten Pinrang Tahun 2016

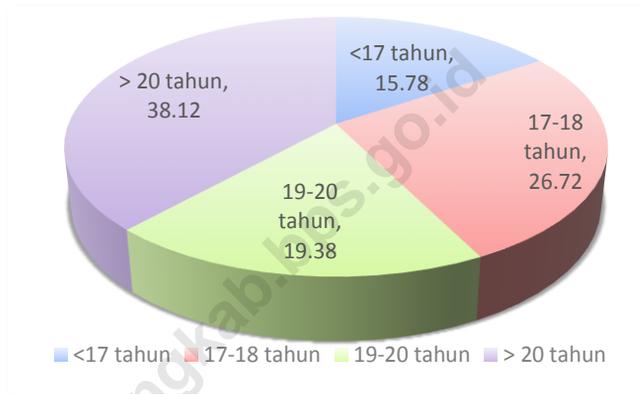
Gambar 10 menunjukkan di Kabupaten Pinrang tahun 2016 memiliki jumlah dokter umum 43 orang, 20 dokter gigi dan 12 dokter spesialis. Rasio penduduk terhadap dokter pada tahun 2016 sebesar 1:4.927, artinya satu dokter umum harus melayani sekitar empat ribu Sembilan ratus penduduk. Hal ini berarti jumlah dokter di Kabupaten Pinrang masih harus sangat ditingkatkan karena pertumbuhan penduduk berjalan sangat cepat, sementara penambahan jumlah tenaga medis tidak sebanding.

2.3.2 Umur pada Kehamilan Pertama

Umur perkawinan pertama adalah faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas. Perkawinan pada umur matang (>20 tahun) menjadikan perempuan lebih siap untuk mengalami proses kehamilan hingga kelahiran nantinya juga pada usia matang. Tidak hanya dari segi fisik tetapi juga dari segi psikologis perempuan akan lebih siap menjadi ibu serta mampu mengurangi risiko persalinan. Himbauan pemerintah untuk umur perkawinan pertama bagi perempuan adalah pada umur 20 tahun dan pada laki-laki umur 25 tahun. Semakin muda umur saat perkawinan pertama artinya semakin besar resiko yang akan dihadapi ibu hamil dan calon bayi yang dikandungnya. Hal ini disebabkan karena belum matangnya kondisi fisik/psikologinya dalam menghadapi perubahan perubahan yang terjadi selama masa kehamilan/melahirkan. Demikian sebaliknya semakin tua umur saat perkawinan pertama akan semakin tinggi resiko pada masa kehamilan/melahirkan.

Tingginya angka kelahiran erat kaitannya dengan umur perkawinan pertama pada seorang perempuan. Umumnya, perempuan yang menikah pada umur muda mempunyai waktu yang lebih panjang untuk beresiko hamil. Oleh karena itu, masyarakat yang mayoritas penduduk perempuannya melakukan perkawinan pertama pada umur muda, angka kelahirannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang penduduk perempuannya

melakukan perkawinan pertama kali pada umur lebih tua. Banyaknya angka kelahiran akan berpengaruh pada kesehatan dan gizi anak dan nantinya berimbas pada angka kematian bayi (*IMR/Infant Mortality Rate*).



Gambar 11 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Umur Perkawinan Pertama di Pinrang Tahun 2016

Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 mayoritas perempuan kawin di usia lebih dari 20 tahun (38,12 persen). Selanjutnya 26,72 persen kawin di usia 17-18 tahun, sebesar 19,38 persen kawin di usia 19-20 tahun dan sisanya sebesar 15,78 persen kawin di usia kurang dari 17 tahun.

Berdasarkan data diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagian besar perempuan kawin pada umur yang matang. Akan tetapi, hal yang perlu dicermati juga bahwa masih relatif tingginya persentase penduduk perempuan di Kabupaten Pinrang yang kawin pertama pada umur yang sangat muda (kurang dari 17 tahun). Persentase tersebut meningkat dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang keluarga yang sejahtera tergolong masih rendah dalam kaitannya dengan melaksanakan umur perkawinan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Oleh karena itu, perlu digalakan kembali sosialisasi tentang kesehatan reproduksi di Kabupaten Pinrang.

2.3.3 Keluarga Berencana

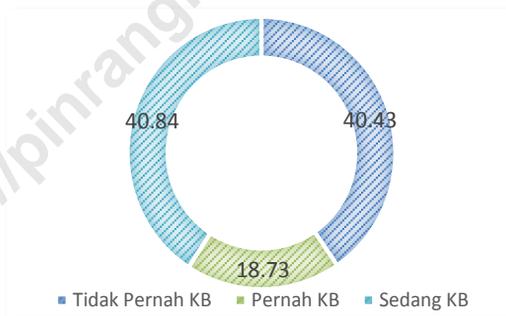
Program KB adalah program yang secara khusus dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan laju pertumbuhan penduduk alami, yaitu melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Memiliki pengetahuan tentang pengendalian kelahiran dan keluarga berencana penting agar dapat memahami tentang berbagai alat/cara kontrasepsi, serta pemakaian alat/cara KB yang tepat dan efektif.

Tingginya angka pemakaian alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS) dapat menggambarkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Gambar 11. menunjukkan bahwa pada tahun 2016 cukup banyak PUS di Kabupaten Pinrang yang pernah menggunakan KB, tercatat 64 persen dan sisanya menyatakan tidak pernah menggunakan KB. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya alasan fertilitas, adat kebiasaan/faham keagamaan, pengetahuan tentang alat/cara KB yang sesuai, biaya yang relatif mahal atau akses ke tempat pelayanan KB yang sulit terjangkau, atau alasan lainnya yang menyebabkan seseorang berpartisipasi atau tidak dalam program keluarga berencana.

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan dibandingkan dengan seluruh PUS. Angka prevalensi kontrasepsi ini sering disebut dengan CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*). Informasi tentang besarnya CPR sangat bermanfaat untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, serta penyediaan pelayanan KB, baik dalam bentuk mempersiapkan pelayanan kontrasepsi seperti sterilisasi,

pemasangan IUD, persiapan alat dan obat kontrasepsi, maupun pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

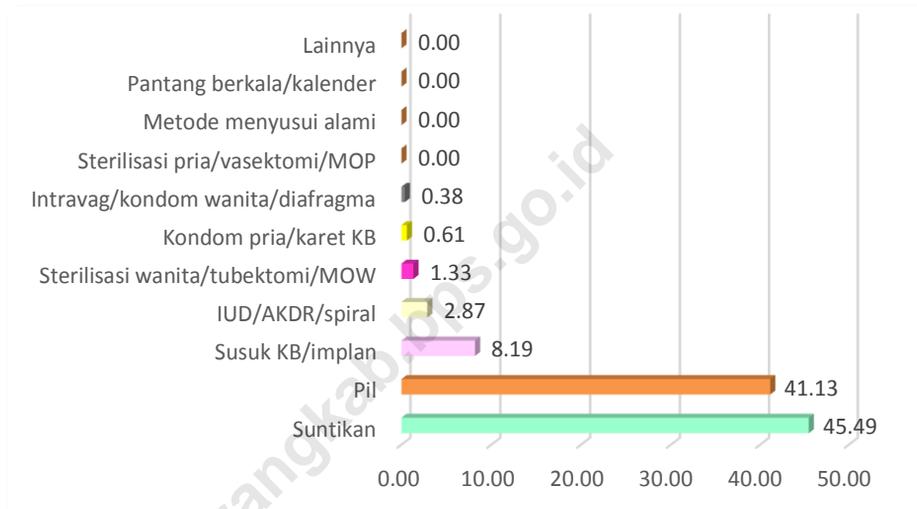
Alat/cara KB ada tiga macam, yaitu cara modern, alamiah, dan cara tradisional. Alat/cara KB modern dapat bersifat kimia (suntikan, pil, dan susuk) dan dapat bersifat non-kimia (spiral, kondom, dan sterilisasi). Cara KB alamiah (*natural family planning methods*) antara lain meliputi sistem kalender, pantang berkala, dan senggama terputus. Cara tradisional meliputi penggunaan ramu-ramuan tradisional yang dipercaya mempunyai khasiat mencegah kehamilan.



Gambar 12 Persentase Perempuan 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB, 2016

Berdasarkan Gambar 12 di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 sebesar 40,43 persen PUS tidak pernah menggunakan alat/cara KB, selanjutnya 18,73 persen PUS pernah menggunakan alat/cara

KB, sementara 40,84 persen PUS sedang menggunakan alat/cara KB. Berdasarkan gambar tersebut berarti, mayoritas PUS mengenal dan pernah menggunakan alat/cara KB.



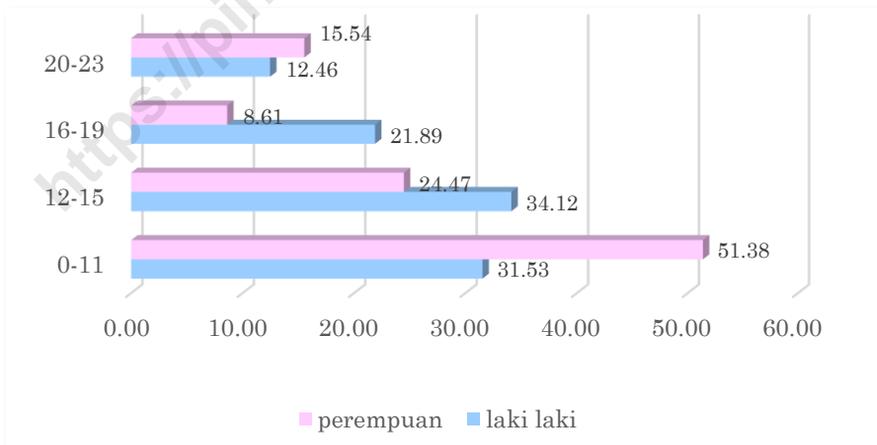
Gambar 13 Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang ber-KB Menurut Jenis Alat KB, Tahun 2016

Untuk WUS yang sedang ber-KB, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Pinrang adalah suntikan sebanyak 45,49 persen. Kemudian pil KB sebanyak 41,13 persen, susuk KB/norplan sebesar 8,19 persen, IUD/spiral 2,87 persen dan tercatat 1,33 persen WUS melakukan sterilisasi wanita, 0,61 persen

menggunakan kondom pria ketika berhubungan, dan sisanya 0,38 persen menggunakan kondom wanita (intravag).

2.3.4 Pemberian ASI

Hal yang tak kalah penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi berumur dibawah 5 tahun (balita). ASI adalah makanan terbaik dan paling penting bagi seorang bayi. Secara alami, baik kandungan gizi maupun imun/zat kekebalan tubuh pada ASI telah memenuhi seluruh kebutuhan bayi dalam jangka waktu enam bulan. Bahkan *UNICEF* telah menyatakan kepeduliannya terhadap perlunya untuk meningkatkan penggunaan ASI.



Gambar 14 Persentase Penduduk Berumur 0-23 Bulan Menurut Lama Pemberian ASI dan Jenis Kelamin, 2016

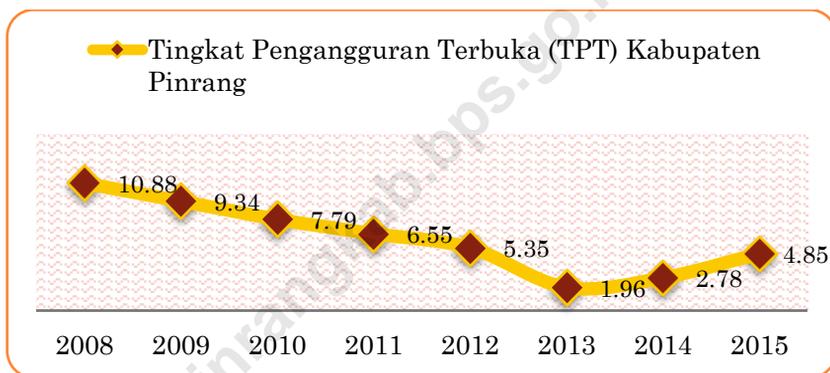
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2017

Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa rata-rata lama pemberian ASI untuk bayi 0-23 bulan di Kabupaten Pinrang adalah 12 bulan. Bayi laki-laki memiliki rata-rata lama pemberian ASI yang lebih tinggi daripada bayi perempuan, yaitu 13,33 bulan dibanding 10,61 bulan. Secara rinci, terlihat pada Gambar 14 bahwa mayoritas bayi 0-23 bulan diberi ASI selama 0-11 bulan untuk bayi perempuan dan 12-15 bulan untuk bayi laki-laki. Sementara itu, pemberian ASI terlengkap hingga 23 bulan untuk bayi perempuan lebih banyak daripada bayi laki-laki (15,54 persen). Hal tersebut berarti kesadaran masyarakat akan pemberian ASI selama 2 tahun di Kabupaten Pinrang tergolong masih kurang. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI masih sangat perlu ditingkatkan.

2.4 Pengeluaran Perkapita

Salah satu aspek pokok dalam permasalahan pembangunan adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan dan non makanan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Kemiskinan diyakini disebabkan beberapa faktor yang bersifat multi aspek, kemiskinan menjadikan seseorang kehilangan kesempatan untuk meningkatkan potensi dirinya.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah faktor pengangguran. Ketidakmampuan memperoleh pendapatan yang dikarenakan tidak bekerja adalah masalah besar yang dihadapi hampir di setiap wilayah. Di Kabupaten Pinrang sendiri, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif selama kurun waktu tahun 2008-2016.



Gambar 15 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2015

Gambar 15 menunjukkan semenjak 2008 hingga 2013, TPT terus menunjukkan tren penurunan jumlah pengangguran. TPT Kabupaten Pinrang pernah berada pada posisi 10,88 persen pada tahun 2008 dan mengalami penurunan luar biasa pada tahun 2013 yang hanya menyisakan 1,96 persen saja. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan TPT menjadi 4,85 persen atau naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang hanya

mencapai 2,78 persen, kondisi ini hendaknya menjadi perhatian khusus agar kedepan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dapat dipenuhi.

Selanjutnya, dalam perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur perubahan pola konsumsi rumah tangga. Jika alokasi untuk konsumsi makanan semakin rendah maka untuk konsumsi non-makanan akan menjadi semakin tinggi. Peningkatan pendapatan diikuti dengan peningkatan konsumsi bukan makanan, karena pada saat tertentu konsumsi untuk makanan akan sampai pada titik jenuh. Pengeluaran perkapita merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pengeluaran terbagi atas pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non makanan.

Aspek yang tak kalah penting menggambarkan kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang digambarkan dengan indikator pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini dapat mengetahui tingkat sensitivitas terhadap perubahan kondisi perekonomian. Selama periode 2010-2016 pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Kabupaten Pinrang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2010 tercatat pengeluaran perkapita sebulan sebesar 10.253 ribu rupiah, selanjutnya lima tahun kemudian rata-rata pengeluaran perkapita per bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 10.899 ribu

rupiah. Kenaikan kurun lima tahun terakhir mencapai 646 ribu rupiah, kondisi ini cukup menggembirakan karena dapat diartikan rata-rata daya beli masyarakat Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan lebih dari setengah juta dalam 5 tahun terakhir.



Gambar 16 Pengeluaran Perkapita Pertahun Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2016 (dalam ribuan rupiah)

Kecenderungan meningkatnya pengeluaran perkapita penduduk berkorelasi dengan kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Pinrang. Dan hal ini berimplikasi pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk di hampir semua sektor. Selain itu peningkatan ini juga berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang. Selama tahun 2016, pendapatan perkapita

penduduk cenderung menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari implikasi kegiatan pembangunan yang sedang terus berjalan di Kabupaten Pinrang, terutama disektor pertanian, perdagangan dan jasa.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab 3.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3

BAB INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

PM sangat diperlukan sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal dan juga dapat mencerminkan kinerja pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai kebijakan pemerintah berlandaskan IPM adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi dasar masyarakat yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Oleh karenanya sangat dibutuhkan data yang terpercaya untuk menyusun itu semua.

Tinggi rendahnya IPM tidak dapat lepas dari program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, yang perlu disadari adalah peningkatan IPM tidak serta merta terjadi dengan mudah karena proses pembangunan manusia tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari suatu pembangunan manusia. Berbagai upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan anggaran kesehatan, dan berbagai program lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun dari tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan,

digunakan angka harapan hidup ketika lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP - *Purchasing Power Parity*/paritas daya beli dalam rupiah). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 10 Dimensi, Indikator dan Indeks Dimensi Pembangunan Manusia

Dimensi	Indikator	Indeks Dimensi
(1)	(2)	(3)
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Indeks harapan hidup => Indeks kesehatan
Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Indeks pendidikan => Indeks Pengetahuan
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (PPP Rupiah)	Indeks Pendapatan => Indeks Pengeluaran

3.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR dan Susenas Modul Konsumsi, data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Data Susenas KOR digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara Angka Harapan Hidup (e0) dihitung menggunakan data Supas dan Proyeksi Penduduk. Indikator daya beli atau PPP dihitung menggunakan data Susenas modul konsumsi yang didasarkan pada 96 komoditi. Sementara itu, untuk mendapatkan pengeluaran per kapita riil digunakan Indeks Harga Konsumen sebagai deflator.

3.2 Manfaat IPM

IPM ini dapat dimanfaatkan untuk beberapa, diantaranya:

➤ **Ukuran Keberhasilan**

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

➤ **Target Pembangunan**

Dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI, IPM dijadikan salah satu indikator target pembangunan.

➤ **Dana Alokasi Umum**

IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

3.3 **Komponen Indeks Pembangunan Manusia**

3.3.1 **Indeks Kesehatan**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Penghitungan AHH melalui pendekatan tak langsung (*Indirect Estimation*) menggunakan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)* atau Mortpack. Dari hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010. Jenis data yang digunakan adalah data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), selanjutnya dipilih metode Trussei dengan metode west yang dianggap sesuai dengan histori kependudukan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

I_{kesehatan} : Indeks Kesehatan

AHH : Angka Harapan Hidup

AHH_{min} : Angka Harapan Hidup Minimum 20 Tahun

AHH_{maks} : Angka Harapan Hidup Maksimum 85 Tahun

Indeks Kesehatan dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 20 tahun.

3.3.2 Indeks Pengetahuan

Komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (*RLS/ Mean Years of Schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (*HLS/ Expected Years of Schooling*). Pada proses pembentukan IPM, penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan

formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berumur 25 tahun keatas. Penghitungan RLS pada umur 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan UNDP.

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

- I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah
 RLS_{min} : Rata-rata Lama Sekolah Minimum 0 Tahun
 RLS_{maks} : Rata-rata Lama Sekolah Maksimum 25 Tahun

Indeks RLS dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 25 tahun dan terendah 0 tahun.

Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu pada masa mendatang. HLS dihitung pada umur 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Keterangan:

- I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 HLS_{min} : Harapan Lama Sekolah Minimum 0 Tahun
 HLS_{maks} : Harapan Lama Sekolah Maksimum 18 Tahun

HLS menggunakan batasan sesuai kesepakatan beberapa Negara, yaitu batas maksimum 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol) tahun. Untuk memperoleh nilai Indeks pengetahuan maka kedua Indeks pembentuknya, baik Indeks Rata-rata Lama Sekolah maupun Indeks Harapan Lama Sekolah digabungkan dengan bobot yang sama.

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

- $I_{Pengetahuan}$: Indeks Pengetahuan
 I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah
 I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah

3.3.3 Standar Hidup Layak

Dimensi selanjutnya dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Standar hidup layak diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul dan dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan Paritas Daya Beli menggunakan 96 komoditas dengan rincian 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Rumus untuk penghitungan Paritas Daya Beli adalah:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Paritas Daya Beli dengan menggunakan harga komoditas di Jakarta Selatan sebagai pembanding harga di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan nilai rata-rata pengeluaran per kapita riil dan paritas daya beli akan diperoleh pengeluaran per kapita yang

disesuaikan. Setelah itu, Indeks pengeluaran sebagai komponen IPM dihitung dengan:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

Tabel 11 Komoditi Kebutuhan Pokok Dasar Penghitungan Daya Beli

Kelompok	Terpilih		
	Share kelompok	Share	Jumlah Item
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	47,29	39,82	66
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/udang/cumi/kerang	3,95	2,3	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyakdan lemak	1,79	1,75	3
Bahan minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,4	3
Konsumsi lainnya	1	0,61	1
Makanan dan minuman jadi	11,8	10,94	19
Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3

Kelompok	Terpilih		
	Share kelompok	Share	Jumlah Item
(1)	(2)	(3)	(4)
Non makanan	52,71	33,81	30
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
Aneka barang dan jasa	18,79	13,5	12
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	3,76	3,35	4
Barang tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0	0
Keperluan, pesta, upacara/kenduri	1,78	0	0
Total	100	73,63	96

Sumber : BPS, Susenas

Dalam menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum dibawah ini:

Tabel 12 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	85	20	Standar <i>UNDP</i>
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	18	0	Standar <i>UNDP</i>
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	Standar <i>UNDP</i>
Daya Beli (Rupiah)	26.572.352**)	1.007.436*)	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan

Keterangan:

*) Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.

**) Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{Pengeluaran}}$$

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan indeks indeks ini. Pertama, lebih dari sekedar mengukur pendapatan atau produksi yang dihasilkan suatu daerah, indeks ini mengukur kesejahteraan manusia secara lebih menyeluruh. Kedua, walaupun demikian, indeks ini tidak dengan sendirinya menyajikan gambaran yang utuh. Berbagai indikator pembangunan manusia lainnya masih harus ditambahkan untuk melengkapinya.

3.3.4 Reduksi Shortfall

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi *shortfall* per tahun. Reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang di tempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM yang ideal (100). Semakin tinggi nilai reduksi *shortfall*, semakin cepat peningkatan IPM.

Reduksi shortfall dihitung dengan:

$$r = \left[\frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{IPM_{ideal} - IPM_t} \times 100 \right]^{1/n}$$

Keterangan :

r : reduksi shortfall

t : tahun

n : selisih tahun antar IPM

IPM_{ideal} : 100

Pengklasifikasian pembangunan manusia seperti pada Tabel 13 bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam pembangunan manusia. Berdasarkan nilai IPM-nya, dapat diketahui bagaimana status

pembangunan manusia di suatu wilayah, apakah termasuk berstatus sangat tinggi, tinggi, sedang ataupun rendah.

Tabel 13 Kriteria Tingkatan Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kriteria	Status Pembangunan Manusia
(1)	(2)
$IPM < 60$	Rendah
$60 < IPM < 70$	Sedang
$70 < IPM < 80$	Tinggi
$IPM > 80$	Sangat Tinggi

Selain itu, IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah adalah negara/daerah maju, atau terbelakang, serta IPM dapat mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks Pembangunan Manusia sudah merupakan angka standar, sehingga dari IPM suatu wilayah dapat dibandingkan dengan IPM wilayah/daerah lain. Atau dapat dikatakan, dengan *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2017*

menghitung IPM Kabupaten Pinrang kita bisa mengetahui posisi Kabupaten Pinrang dalam hal pembangunan manusianya diantara daerah-daerah yang lain.

3.4 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang

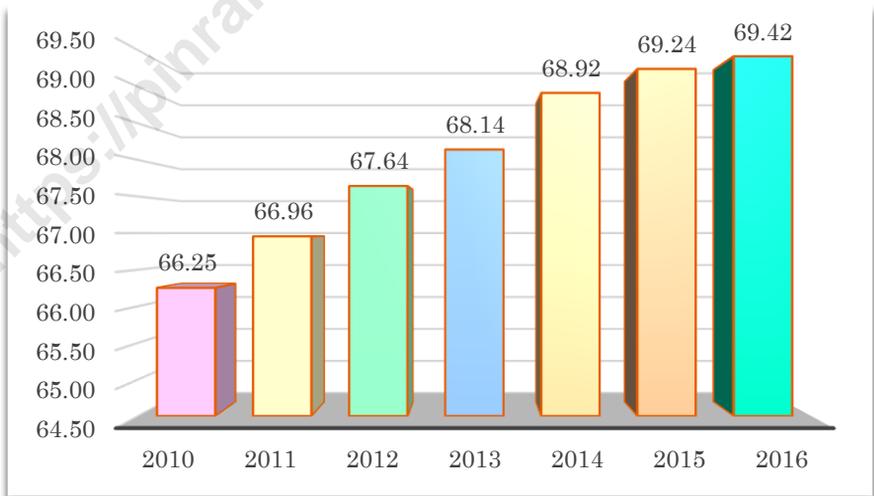
Berdasarkan teknik penghitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka akan diperoleh komponen pembentuk IPM, sebagai berikut:

Tabel 14 Indeks Pembentuk IPM Kabupaten Pinrang, 2015-2016

URAIAN (ANGKA)	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Harapan Hidup (tahun)	68,43	68,55
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,17	13,18
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,47	7,48
Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.791	10.899
Indeks Kesehatan	74,51	74,69
(Indeks HLS)	73,17	73,22
(Indeks RLS)	49,83	49,87
Indeks Pendidikan	61,50	61,54
Indeks Pengeluaran	72,46	72,77
IPM	69,24	69,42

Sumber : BPS

Pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang dari tahun ketahun menunjukkan perbaikan kearah yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada angka IPM yang terus mengalami kenaikan. Penggunaan perhitungan IPM metode baru ternyata membuat dampak terjadinya penurunan dari segi nilai tetapi pada hakikatnya tetap terjadi kenaikan. Setidaknya sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 (lihat Gambar 17), IPM Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan sebesar 3,17 poin dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Peningkatan tersebut merupakan indikasi yang kuat untuk menyatakan bahwa di Kabupaten Pinrang telah terjadi perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan serta ekonomi.



Gambar 17 IPM Kabupaten Pinrang 2011-2016

Jika mengaju pada skala internasional, capaian IPM Kabupaten Pinrang termasuk kategori sedang ($60 < \text{IPM} < 70$). Hal ini terjadi sejak tahun 2010 hingga tahun 2016, IPM Kabupaten Pinrang masih stagnan pada kategori IPM sedang. Tumbuhnya berbagai pusat bisnis dan pertanian ternyata mampu mempertahankan IPM Kabupaten Pinrang kearah yang lebih baik, terbukti saat ini hampir mendekati 70 (kategori tinggi).

Sementara itu, jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, Kabupaten Pinrang menempati IPM urutan ke-6 tertinggi se-Sulawesi Selatan. Kabupaten/kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kota Palopo, diikuti Kabupaten Luwu Timur, dan Enrekang. Tiga peringkat teratas ditempati oleh tiga kota yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Sementara peringkat selanjutnya yaitu peringkat 4, 5 dan 6 ditempati oleh kabupaten yang berada di sekitar kota-kota dengan IPM tertinggi. Hal ini menyiratkan bahwa kemajuan pendidikan, kesehatan dan perekonomian di wilayah tertentu akan mempengaruhi pula daerah-daerah penyangga yang berlokasi di sekitarnya.

Pada Tabel 15, terlihat bahwa peringkat IPM tertinggi pada tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makasar, disusul oleh Kota Pare-Pare dan Kota Palopo. Kabupaten Pinrang sendiri berada pada urutan yang baik (peringkat 6 dari 24 kabupaten/kota).

Tabel 15 IPM Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Tahun 2016

Kode Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	IPM	Rank IPM*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7300	Sulawesi Selatan	69.82	13.16	7.75	10,281	69.76	14
7301	Selayar	67.76	12.44	7.17	8,123	64.95	22
7302	Bulukumba	66.84	12.64	6.86	10,040	66.46	17
7303	Bantaeng	69.84	11.88	6.17	10,596	66.59	16
7304	Jeneponto	65.57	11.77	5.65	8,559	61.81	24
7305	Takalar	66.29	12.00	6.64	9,759	64.96	21
7306	Gowa	69.92	13.03	7.52	8,717	67.70	12
7307	Sinjai	66.54	12.83	7.06	8,706	65.36	20
7308	Maros	68.58	12.96	7.20	9,758	67.76	11
7309	Pangkajene Kepulauan	65.77	12.39	7.33	10,670	66.86	15
7310	Barru	68.16	13.54	7.61	10,155	69.07	8
7311	Bone	66.12	12.42	6.76	8,275	63.86	23
7312	Soppeng	68.62	12.20	7.06	8,965	65.95	19
7313	Wajo	66.38	13.08	6.38	11,681	67.52	13
7314	Sidenreng Rappang	68.69	12.89	7.33	11,368	69.39	7
7315	Pinrang	68.55	13.18	7.48	10,899	69.42	6
7316	Enrekang	70.34	13.65	8.06	10,188	70.79	5
7317	Luwu	69.52	13.27	7.75	9,301	68.71	9
7318	Tana Toraja	72.48	13.24	7.92	6,509	66.25	18
7322	Luwu Utara	67.50	12.33	7.39	10,786	67.81	10
7325	Luwu Timur	69.71	12.78	7.88	11,960	70.95	4
7326	Toraja Utara	72.87	13.33	7.72	7,228	67.49	14
7371	Kota Makassar	71.49	14.80	11.07	16,013	80.53	1
7372	Kota Pare Pare	70.64	14.45	10.02	12,966	76.48	2
7373	Kota Palopo	70.25	15.03	10.26	12,156	76.45	3

Sumber : BPS

Data hasil perhitungan IPM yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang pada posisi yang relatif baik disebabkan beberapa komponen penyusun IPM Kabupaten Pinrang ternyata memiliki angka diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Komponen penyusun IPM seperti harapan lama sekolah sebesar 13,18 tahun berada diatas HLS Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 13,16 tahun. Kemudian untuk daya beli di Kabupaten Pinrang sendiri menunjukkan bahwa Paritas daya beli (PPP) sebesar 10.899 ribu rupiah atau berada diatas PPP Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya 10.281 ribu rupiah saja.

Namun, terdapat juga angka berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan (69,82 tahun) yaitu angka harapan hidup Kabupaten Pinrang sebesar 68,55 tahun. Kemudian rata-rata lama sekolah untuk Kabupaten Pinrang sebesar 7,48 tahun berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan (7,75 tahun).

AHH Kabupaten Pinrang yang masih dibawah rata-rata mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang harus lebih meningkatkan sarana dan dan prasarana bidang kesehatan agar kedepannya masyarakat bisa lebih sejahtera dan sehat sehingga memiliki umur yang panjang atau meningkatkan AHH.

Kendati HLS di Kabupaten Pinrang sudah menuju kearah yang positif bukan berarti pemerintah boleh menghentikan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan lama sekolah

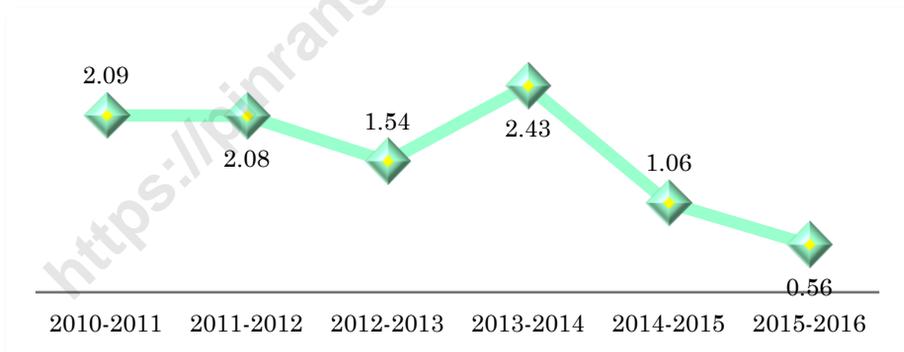
merupakan pemicu (*booster*) bagi peningkatan pembangunan manusia dibidang pendidikan. Karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang dapat lebih meningkatkan pembangunan sarana prasarana serta kualitas pendidikan.

Yang tak kalah penting adalah mencermati paritas daya beli penduduk di Kabupaten Pinrang yang menunjukkan daya beli cukup tinggi. Kondisi ini tak terlepas dari lokasi yang dekat dengan kota-kota penyangga seperti Kota Pare-Pare maupun Kota Makasar. Akses yang mudah dan budaya secara umum suku-suku di Pinrang yang lebih konsumtif menyebabkan paritas daya beli yang tinggi. Mencermati kondisi seperti itu, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang hendaknya masih harus diupayakan sedemikian rupa sehingga mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dan lebih merata, yaitu dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Kabupaten Pinrang.

Peringkat tertinggi nomor enam dalam pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Selatan menjadikan pemerintah Kabupaten Pinrang hendaknya tetap mawas diri dan tetap terus melakukan upaya-upaya pembangunan yang pro-rakyat yaitu dengan lebih meningkatkan kualitas pembangunan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Sehingga, kedepannya pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang semakin baik yang ditunjukkan oleh terus meningkatnya

Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di kabupaten ini. Karena bukan tidak mungkin suatu saat nanti jika berbagai indikator sudah terpenuhi Kabupaten Pinrang bisa bertransformasi menjadi sebuah kota.

Reduksi *shortfall* adalah indikator untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam kurun waktu tertentu. Gambar 18 menunjukkan *Reduksi Shortfall* per tahun. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa kecepatan perkembangan IPM paling tinggi terjadi pada kurun waktu 2013-2014. Sementara perkembangan paling lambat terjadi pada masa sekarang ini, yaitu 2015-2016.



Gambar 18 Reduksi *Shortfall* per tahun, 2010-2016

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan tingginya angka IPM saja melainkan juga melihat sejauh mana IPM tersebut melaju dari waktu ke waktu. Jika semakin rendah

kecepatan peningkatan IPM, maka semakin lama pulalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai angka IPM yang ideal karena reduksi *shortfall* adalah gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai nilai ideal 100.

Dapat dikatakan juga bahwa reduksi *shortfall* merupakan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang ingin ditempuh yaitu titik ideal IPM yaitu 100. Untuk Kabupaten Pinrang sendiri kecepatan untuk mencapai titik ideal kurun waktu 2015-2016 mengalami laju yang cukup kecil, karena tren *shortfall* menunjukkan penurunan yang semakin tajam setelah tahun 2014.

Hal ini merupakan indikasi awal bahwa berbagai komponen penting dalam IPM yaitu kesehatan (Angka Harapan Hidup), pendidikan (*RLS* dan *HLS*) dan standar hidup layak (*PPP*) di Kabupaten Pinrang setidaknya 6 tahun terakhir telah mengalami tren penurunan yang cukup mengkhawatirkan. Jika kondisi ini terus berlanjut maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai kondisi ideal (100) atau menjadi daerah yang maju.

Daftar Istilah Statistik

Definisi Istilah-Istilah Statistik

Anak Lahir Hidup

Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok perempuan selama masa reproduksinya. Anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun mungkin hanya beberapa saat saja seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut lahir mati.

Anak Masih Hidup

Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang perempuan sampai saat wawancara dilakukan.

Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Balita (AKBa)

Jumlah kematian anak berumur 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur satu tahun per 1000 kelahiran hidup.

Akses terhadap fasilitas kesehatan

Persentase rumah tangga yang tinggal pada jarak kurang dari 5 kilometer dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter, juru rawat, bidan yang terlatih, paramedik dan sebagainya).

Anak dibawah lima tahun (Balita) yang kekurangan gizi

Merujuk pada anak dengan berat badan kurang (menderita kurang gizi tingkat sedang dan parah). Kekurangan gizi sedang merujuk pada persentase anak berumur dibawah lima tahun yang memiliki berat badan dibawah dua standar deviasi dari median berat badan anak berumur tersebut. Kekurangan gizi parah merujuk pada persentase anak berumur dibawah tiga standar deviasi dari median berat badan anak berumur tersebut.

Angka Morbiditas

Proporsi dari keseluruhan penduduk yang menderita akibat masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir.

Angka Melek Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya.

Angka Buta Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya. Dihitung dengan cara 100 dikurangi dengan angka melek huruf (dewasa).

Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12; 13-15; 16-18; dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Angka putus sekolah

Proporsi dari penduduk berumur antara 7 hingga 15 tahun yang tidak terdaftar pada berbagai tingkatan pendidikan dan tidak menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat pertama.

Dapat membaca dan menulis

Dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Garis Kemiskinan

Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar kebutuhan-kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk dapat hidup secara layak.

Paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP)

PPP memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi perkapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan rumus Atkinson.

Konsumsi Total

Konsumsi barang-barang dan jasa-jasa dengan mengabaikan asal barang dan jasa tersebut. Konsumsi total juga mencakup pemberian dan barang/jasa yang diproduksi sendiri oleh rumah tangga yang bersangkutan. Dalam laporan ini, konsumsi total merujuk pada konsumsi bulanan.

Pengeluaran untuk Makanan

Proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan).

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan relatif nilai riil produk domestik bruto dalam suatu periode tertentu.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Jumlah nilai tambah bruto (total output dari barang dan jasa) yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi di suatu negara selama periode waktu tertentu.

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Merujuk pada nilai produk domestik bruto berdasarkan nilai uang yang berlaku pada tahun tersebut

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Merujuk pada nilai produk domestik bruto berdasarkan nilai uang pada tahun yang dipergunakan sebagai tahun dasar.

Produk Domestik Bruto per Kapita

Nilai dari produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*)

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Indeks Harapan Hidup

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Nilai indeks ini berkisar antara 0 - 100.

Indeks Pendidikan

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara angka melek huruf di kalangan penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah. Nilai indeks tersebut berkisar antara 0 hingga 100.

Indeks Daya Beli

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia yang didasarkan pada paritas daya beli (PPP) disesuaikan dengan rumus Atkinson. Nilai indeks berkisar antara 0 - 100.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur

dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0-100.

Indeks Pembangunan Jender (IPJ)

Indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas jender. Komponen-komponen IPJ sama dengan komponen-komponen IPM yang telah disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Nilai indeks berkisar antara 0 - 100.

Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ)

Indeks komposit yang disusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDJ didasarkan pada tiga indikator: persentase perempuan diparlemen, persentase perempuan di lingkungan pekerja profesional, teknisi, tenaga kepemimpinan dan ke tatalaksanaan, serta sumbangan perempuan sebagai penghasil pendapatan. Nilai indeks tersebut berkisar antara 0 - 100.

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

Indeks komposit yang mengukur deprivasi (keterbelakangan) dalam tiga dimensi: lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.

Imunisasi Memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan kedalam tubuh dengan cara suntik atau telan dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

Tidak/belum pernah sekolah Tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/ belum tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.

Masih bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau tinggi.

Tidak sekolah lagi

Pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Tamat sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Medis Operasi Perempuan (MOW/sterilisasi perempuan/tubektomi)

Operasi yang dilakukan pada perempuan untuk mencegah terjadinya kehamilan, yaitu mengikat saluran telur agar perempuan itu tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk mengambil rahim atau indung

telur kadang-kadang dilakukan karena alasan-alasan lain, dan bukan untuk memberikan perlindungan agar perempuan tidak mempunyai anak lagi. Yang dicatat sebagai sterilisasi di sini hanya operasi yang ditujukan agar seorang perempuan tidak bisa mempunyai anak lagi.

Medis Operasi Pria (MOP/sterilisasi Pria/Vasektomi)

Suatu operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya. IUD/Spiral Alat yang dibuat dari plastik halus/tembaga, berukuran kecil, berbentuk spiral, T, kipas dan lainnya, dipasang di dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Suntikan KB

Salah satu cara pencegahan kehamilan dengan jalan menyuntikkan cairan tertentu kedalam tubuh, misalnya satu, tiga atau enam bulan sekali. Cara ini disebut juga *depo provera*.

Pil KB

Pil yang ditelan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil ini harus ditelan secara teratur setiap hari. Orang dikatakan sedang menggunakan pil KB, apabila sejak haid terakhir ia menelan pil KB setiap hari.

Kondom/karet KB

Alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh laki-laki selama bersenggama dengan maksud agar istrinya/pasangannya tidak menjadi hamil. Orang dikatakan sedang

menggunakan kondom apabila sejak haid terakhir pasangannya selalu menggunakan kondom waktu berkumpul, termasuk saat kumpul terakhir.

Norplant/implant/susuk KB

Enam batang logam kecil yang dimasukkan kebawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Orang dikatakan menggunakan susuk KB apabila susuk KB terakhir dipasang di tubuhnya kurang dari 5 (lima) tahun sebelum pencacahan.

KB Lainnya

Antara lain intravag yakni tissue KB yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum kumpul.

Alat/cara tradisional

Antara lain pantang berkala/sistim kalender, senggama terputus, tidak campur, jamu, dan urut.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2012*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2015*. Pinrang.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Varia Statistik edisi Oktober 2017*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2017. *Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Kabupaten Pinrang 2016*. Pinrang.
- Meneg PP dan BPS. 2008. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007*. Jakarta.
- United Nations Development Programme. 1993. *Human Development Report*. New York. UNDP.
- , 2009. *Human Development Report*. New York. UNDP.
- , 2010. *Human Development Report*. New York. UNDP.
- , 2011. *Human Development Report*. New York. UNDP.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No. 18 Pinrang, Sulawesi Selatan
Telp./Fax : (0421)921021
E-mail : bps7315@bps.go.id
Homepage : pinrangkab.bps.go.id